

Politik pembahasan legislasi di Indonesia: studi kasus kemenangan paket A pada pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum tahun 2017 = Political discussion of legislation in Indonesia: case of study the winning of policy package A on 2017 election policy change / Kartika Lestari Sianipar

Sianipar, Kartika Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476594&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkoalisan adalah hal yang umum ditemui dalam pembahasan kebijakan di sistem multipartai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika sikap dan perilaku dalam berkoalisi oleh fraksi-fraksi di DPR pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 RUU Pemilu Tahun 2017. Pada pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017 tersebut, koalisi pendukung pemerintah berhasil memenangkan Paket A setelah pendukung paket B yang merupakan partai-partai oposan melakukan walkout. Dinamika koalisi sendiri menarik karena dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor materi isu-isu yang dibahas maupun lingkungan dan konteks social-ekonomi-politik yang ada. Untuk meneliti kasus tersebut, digunakan dua teori yaitu Teori Koalisi Berbasis Kebijakan Policy-Driven Coalitions Theory dan Teori Tawar-Menawar dalam Koalisi Political Bargaining On Coalitions Theory. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif untuk memahami bagaimana sikap-sikap fraksi diputuskan. Data diambil dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Tahun 2017. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari risalah rapat dan Sidang Pansus dan DPR. Sedangkan observasi dilakukan pada proses pembuatan kebijakan tersebut. Ada beberapa temuan dari penelitian ini: pertama, sikap dan perilaku partai-partai didasari oleh perhitungan instrumental dan non-instrumental serta konteks social politik yang ada. Pertimbangan instrumental terdiri dari: 1 keuntungan dari isu-isu yang dibahas dalam RUU Pemilu Tahun 2017; 2 konsekuensi dari keputusan politik untuk berkoalisi. Sedangkan pertimbangan non-instrumental berkaitan dengan adanya factor keterhubungan connectedness antar partai utamanya dalam hal identifikasi social partai-partai tersebut. Faktor populisme Islam menjadi factor pembentuk identifikasi social di antara partai-partai tersebut. Kedua, struktur imbalan menjadi variabel independen yang penting dalam menentukan dinamika di kelompok partai-partai pendukung pemerintah. Pertimbangan non-instrumental sangat terlihat di kelompok partai-partai non-pendukung pemerintah disamping pertimbangan instrumental. Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi teori-teori yang digunakan. Keterbatasan adalah dalam mengukur seberapa besar korelasi dan signifikansi variabel independen terhadap variable dependen. Kata Kunci: RUU Pemilu Tahun 2017, Koalisi, Presidential Coattail, Tawar-Menawar.

<hr>

ABSTRACT

Coalitions is common phenomena in multiparty system policy making. The objective of this papers is to analyze political behavior on coalitions formations of Indonesia election policy change conducted in 2017. Coalitions of Government Supporting Parties won over their oppositions, after three deadlocks and opposition walkout in the voting session. The case is interesting for two reasons the debates on the issues

and its socio political context. For that purposes, I use two theories in this papers first is Policy Driven Coalitions Theory, and the second is Political Bargainig on Coalitions Theory. I argue that political behavior on formation coalitions in that case influenced by instrumental and non instrumental backgrounds. This research qualitative method with three data collections interview, documents research and observations. I Interviewed members of Panitia Khusus Pansus of Election Act Proposal, researched Pansus and DPR Talking Sessions Documents and did observe the process. There are two finding in this research first, as I argue, intstrumental and non instrumental background are influence the behavior and decision on coalitions formations as well as socio political context. Two kinds of instrumental background found in this case are parties interest on the issues and the political consequences of their decisions due to socio polical context surrounding the policy making process. The non instrumental background on this case refers to parties connectedness for their self social identification similarities. Islamic populism is the main influencing factor on that self social identification. Second, from the research we find that instrumental background is significant reason for government coalitions parties to their decisions on coalitions. The presidential coattail and payoff structured by Jokowi is main factor on that aspect. In the non government coalitions parties, connectedness among them influence the decision on coalitions as well as their interest on policy issues. Those findings confirm the Theories of Policy Driven Coalitions and the Theory of Political Bargaining in Coalitions used in this research. This research is qualitative based so has limitations on quantitave aspect to clarify the correlations of the connecting variables and those significancies. Key Words Indonesian Election Policy Change 2017, Coalitions, Political Bargaining, Presidential Coattail